

KAJIAN

Diagnosa Awal Kinerja Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dan
Potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)





Potensi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia:

**Diagnosa Awal Kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Potensi Usaha Mikro
dan Kecil (UMK)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tujuan	9
1.3 Ruang Lingkup.....	9
1.4 Landasan Teori.....	9
1.5 Metodologi.....	11
DIAGNOSA BPR/BPRS: TINJAUAN PORTOFOLIO DAN KINERJA BPR/BPRS NASIONAL.....	12
2.1 Aset BPR/BPRS terhadap Produk Domestik Regional Bruto	12
2.2 Pembiayaan BPR/BPRS terhadap Produk Domestik Regional Bruto	12
2.2.1 Sebaran Portofolio Pembiayaan BPR/BPRS Regional	14
2.2.2 Sebaran <i>Loan to Deposit Ratio</i> BPR/BPRS Regional.....	15
2.3 Portofolio Dana BPR/BPRS Regional	16
2.4 Sebaran dan Besaran Rata-Rata Deposito BPR/BPRS Regional	17
DIAGNOSA UMK: TINJAUAN SEBARAN KARAKTERISTIK UMK NASIONAL.....	19
3.1 Sebaran Karakteristik UMK Nasional: Jumlah UMK terhadap PDRB dan Pekerja	19
3.2. Sebaran Pembiayaan terhadap UMK.....	21
KESIMPULAN	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar a. Jumlah Tenaga Kerja pada UMK.....	7
Gambar b. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	7
Gambar c. Pembiayaan Sektor UMK terhadap Total Kontribusi UMK dalam PDB	8
Gambar d. Kontribusi UMK terhadap PDB (harga berlaku)	8
Gambar e. Kredit BPR/BPRS dan Persentase thdp Total Kontribusi UMK dalam PDB.....	8
Gambar f. Performa Kualitas Pinjaman (Tingkat NPL)	9
Gambar g. Persentase Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga.....	9
Gambar h. Kontribusi Aset BPR/BPRS terhadap PDB Regional.....	12
Gambar i. Kontribusi Aset BPR/BPRS terhadap PDB Regional per Provinsi.....	13
Gambar j. Portofolio Pembiayaan BPR/BPRS per Provinsi.....	14
Gambar k. Tingkat LDR (FDR) BPR/BPRS Regional	15
Gambar l. Portofolio Dana BPR/BPRS per Regional.....	16
Gambar m. Rata-Rata Dana Tabungan BPR/BPRS per Regional	17
Gambar n. Rata-Rata Dana Deposito BPR/BPRS per Regional.....	18
Gambar o. Jumlah Usaha Kecil dan Mikro	19
Gambar p. Rasio Pekerja UMK dari Total Angkatan Kerja Daerah (%)	20
Gambar q Rata-rata Jumlah Pekerja di UMK	20
Gambar r. Persentase UMK yang Mendapat Pembiayaan Bank pada Saat Didirikan	21
Gambar s. Persentase UMK yang Mendapat Pembiayaan Bank pada Saat Survei.....	22
Gambar t. Identifikasi Kondisi Pembiayaan UMK melalui BPR dengan metode kuadran	23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya, Kajian Potensi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia: Diagnosa Awal Kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Potensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai suatu kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan tahun 2022, laporan ini merupakan bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas Badan Kebijakan Fiskal. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran BPR dan BPRS di lapangan, khususnya tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS dalam menyalurkan kredit dan menggalang dana pihak ketiga. Laporan ini berisi identifikasi mengenai kinerja BPR dan BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk UMK di tingkat provinsi. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui *best practice* dari BPR dan BPRS yang memiliki kinerja bagus untuk menjadi contoh bagi BPR dan BPRS lain dan memberikan masukan pada kerangka peta jalan pembiayaan UMK.

Kami berharap Kajian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi salah satu referensi untuk menganalisa perkembangan BPR dan BPRS serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk terus mengembangkan akses pembiayaan untuk UMK. Saran, komentar maupun kritik dari seluruh pihak sangat kami harapkan dalam penyempurnaan analisis dan kajian di masa mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
Badan Kebijakan Fiskal
Jakarta, November 2022

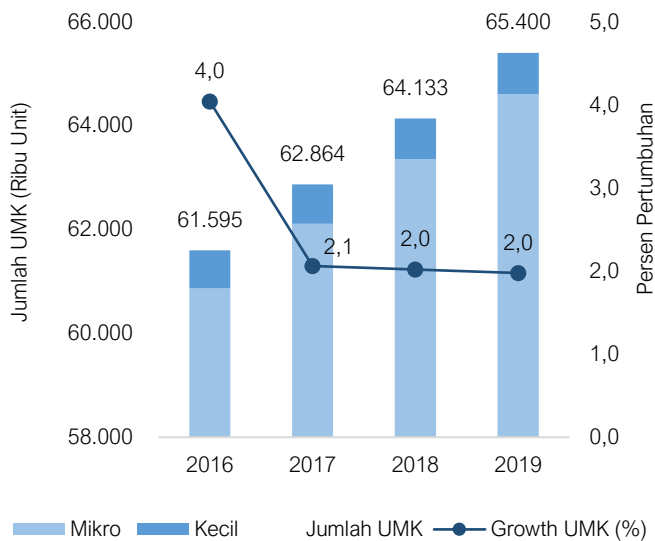
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

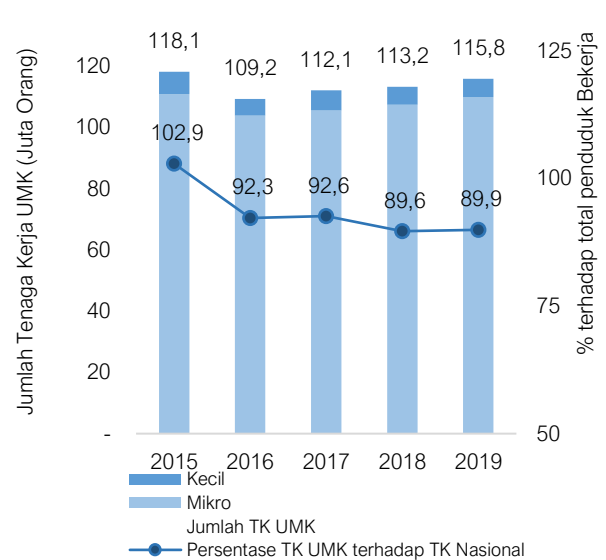
Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMK yang terus bertumbuh. Per tahun 2019, jumlah UMK di Indonesia mencapai 65,4 juta unit atau tumbuh 2 persen dibandingkan tahun 2018. Selain itu, persentase tenaga kerja UMK terhadap jumlah penduduk yang bekerja sangatlah besar yaitu mencapai 89,9 persen pada tahun 2019. Jumlah tenaga kerja UMK tercatat sebesar 115,8 juta orang per tahun 2019 dan 110 juta diantaranya merupakan tenaga kerja usaha mikro. Besarnya jumlah unit usaha dan tenaga kerja UMK membuat UMK berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kontribusi sektor UMK mencapai 46,9 persen terhadap PDB nasional, dari tahun 2015 yang hanya sebesar 41,9 persen.

Peranan penting dari UMK membutuhkan dorongan terutama dari sisi pembiayaan atau *financing* terhadap UMK. Lebih banyaknya pembiayaan terhadap UMK akan meningkatkan kapasitas bisnis UMK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian pembiayaan sektor UMK oleh Bank Umum masih sebesar kurang dari 10 persen terhadap total kontribusi UMK dalam PDB. Oleh karena itu, peningkatan akses pembiayaan terhadap UMK perlu dikembangkan untuk mendorong perekonomian nasional. Salah satu lembaga intermediasi formal yang berfokus terhadap pembiayaan UMK adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Gambar b. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

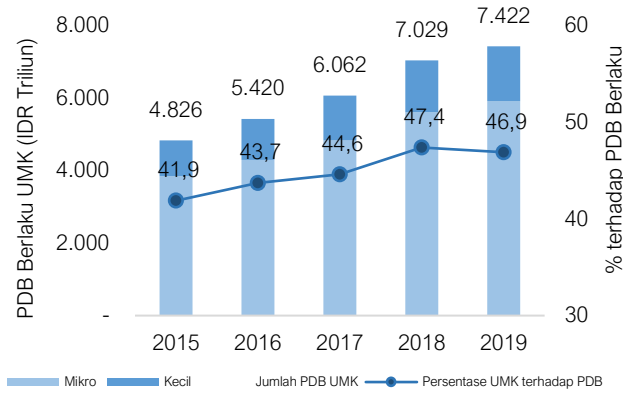


Gambar a. Jumlah Tenaga Kerja pada UMK



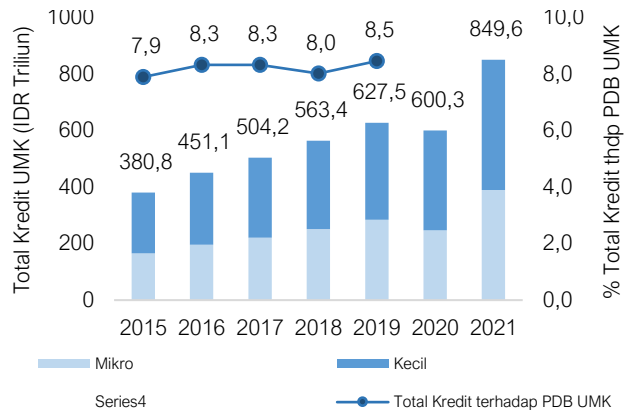
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik

Gambar d. Kontribusi UMK terhadap PDB (harga berlaku)



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik

Gambar c. Pembiayaan Sektor UMK terhadap Total Kontribusi UMK dalam PDB



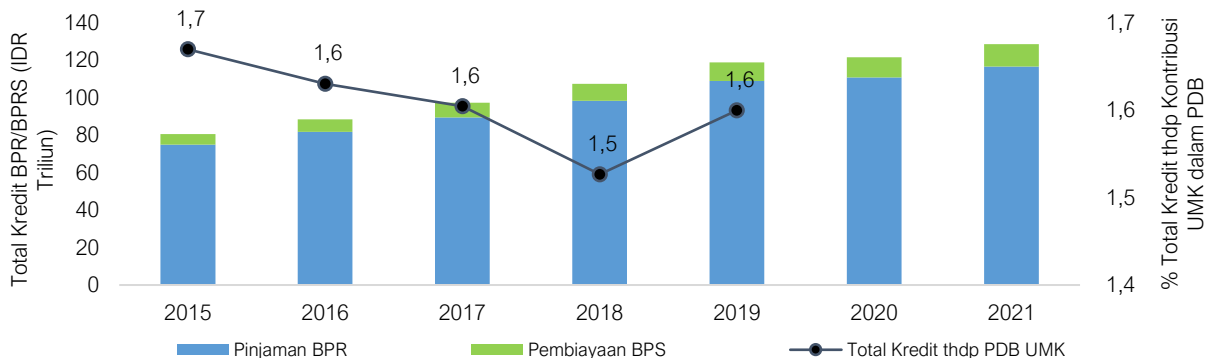
Sumber: SEKI Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Total pinjaman BPR dan BPRS tercatat kurang dari 2 persen terhadap kontribusi UMK dalam PDB Nasional. Rendahnya persentase tersebut menunjukkan bahwa BPR dan BPRS masih memiliki peluang yang besar dalam melakukan ekspansi bisnis pinjamannya. Namun demikian, BPR dan BPRS memiliki beberapa tantangan dan permasalahan dalam melakukan ekspansi bisnis, yaitu seperti rendahnya tingkat likuiditas. Hal ini tercermin dari tingkat persentase total kredit BPR dan BPRS terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi, sehingga kemampuan BPR dan BPRS terbatas untuk menyalurkan pinjaman. Dengan demikian, BPR dan BPRS perlu menambah modal dan atau meminjam ke pihak lain (dan bank) untuk mendukung ekspansi bisnis pinjamannya terutama ke sektor UMK.

Selain itu, sumber dana BPR dan BPRS sebagian besar berasal dari dana jangka panjang atau deposito. Hal ini dapat menimbulkan *mismatch* dari sisi *maturity* kredit dan simpanan. Dari sisi risiko, tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di BPR dan *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS lebih tinggi dibandingkan NPL Bank Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa pinjaman dan pembiayaan BPR/BPRS memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum.

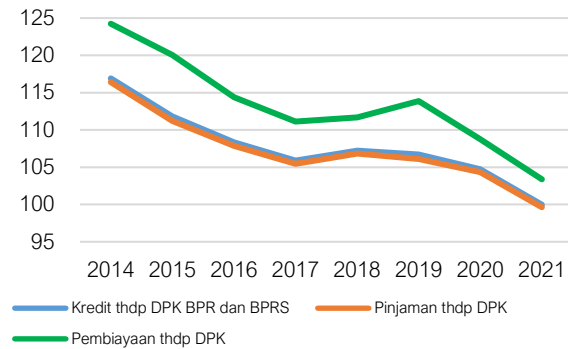
Berbagai tantangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPR/BPRS tersebut dapat mengancam *sustainability* bisnis BPR dan BPRS. Sejak tahun 2019 hingga 2021, tercatat sebanyak 10 BPR dan 4 BPRS telah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sementara sebanyak 9 BPR dan 2 BPRS masih dalam proses likuidasi.

Gambar e. Kredit BPR/BPRS dan Persentase thdp Total Kontribusi UMK dalam PDB



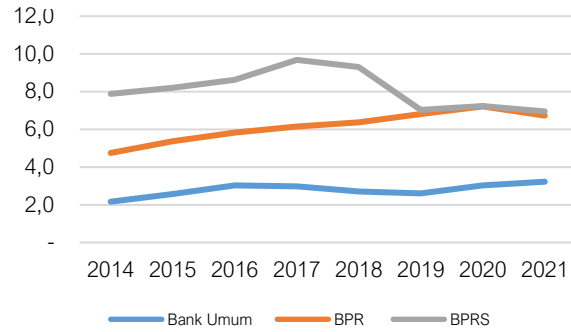
Sumber: SPI OJK dan Badan Pusat Statistik

Gambar g. Persentase Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga



Sumber: SPI OJK

Gambar f. Performa Kualitas Pinjaman (Tingkat NPL)



Sumber: SPI OJK

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi BPR dan BPRS di lapangan, khususnya tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan dan menggalang DPK. Dalam laporan pertama ini dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai kinerja BPR dan BPRS dalam menjadi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk UMK di tingkat provinsi. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui *best practice* dari BPR dan BPRS yang memiliki kinerja bagus untuk menjadi contoh bagi BPR dan BPRS lain dan memberikan masukan pada kerangka peta jalan pembiayaan UMK.

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa variabel ekonomi dengan menggunakan skala provinsi di Indonesia (34 provinsi) dan variabel kinerja industri BPR dan BPRS. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu CEIC, Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Ototitas Jasa Keuangan, BPS, Kementerian Koperasi dan UMK, serta Bank Indonesia.

1.4 Landasan Teori

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan, menurut Schumpeter (1911) dalam hipotesis *finance-led growth*, berfungsi memfasilitasi pertumbuhan sektor riil yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada seberapa baiknya sektor keuangan negara itu. Semakin dalam dan bertumbuh sektor keuangan semakin besar pasokan dana yang mengalir dari sektor keuangan ke sektor riil. Bagi para pengambil kebijakan, hubungan antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sektor keuangan harus dipahami dalam rangka memformulasikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan sektor keuangan.

Konsepsi hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil terus tumbuh dan berkembang secara dinamis. Untuk memahami peranan sektor keuangan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pendekatan yang lazim digunakan adalah bersifat fungsional sistem keuangan. Merton (1995) dan Merton & Bodie (1995) misalnya, merumuskan pendekatan ini dalam 6 (enam) fungsi utama sistem keuangan, yaitu : (i) menyediakan sarana untuk pembayaran kliring dan pelunasan

(*clearing and settling payments*) dalam memfasilitasi pertukaran barang, jasa dan aset; (ii) menyediakan mekanisme penyatuan/pengumpulan dana-dana untuk menjalankan perusahaan berskala besar yang bisa dipisahkan; (iii) menyediakan suatu cara untuk mentransfer sumber daya ekonomi antar waktu, wilayah geografis, dan industri; (iv) menyediakan sarana untuk mengelola risiko (ketidakpastian dan kontrol risiko); (v) memberikan informasi untuk membantu mengoordinasikan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi di berbagai sektor ekonomi; dan (vi) menyediakan sarana untuk menangani masalah-masalah informasi yang asimetris dan insentif yang tercipta ketika salah satu pihak untuk transaksi keuangan memiliki informasi dimana pihak lain tidak, atau pengambilan keputusan ketika salah satu pihak bertindak sebagai agen bagi yang lain.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pengaruh pembangunan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah model pertumbuhan endogen yang paling sederhana, yaitu model AK (Pagano, 1993). Menurut model AK, produksi barang dan output agregat (y) dalam suatu perekonomian pada waktu t merupakan fungsi linear dari stok modal agregat (K)

$$y_t = AK_t \quad (1)$$

A = produktivitas marjinal modal (*marginal productivity of capital*).

Sementara itu, stok modal agregat pada waktu t adalah:

$$K_t = I_{t-1} + (1 - \delta)K_{t-1} \quad (2)$$

dimana I adalah investasi yang sama dengan barang non-konsumsi yang menyusut dengan tingkat depresiasi δ per periode waktu. Kondisi keseimbangan pasar modal mensyaratkan bahwa tabungan bruto (*gross saving*) sama dengan investasi bruto (*gross investment*). Karena bagian dari tabungan ($1-\delta$) hilang dalam proses penyaluran tabungan menjadi investasi, dana-dana yang tersedia untuk investasi adalah sebesar:

$$\delta S_{t-1} = I_{t-1} \quad (3)$$

Selanjutnya, konsep keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil terus berkembang, hingga muncul konsep hubungan dua arah yang dikemukakan oleh Patrick (1966), yang terdiri dari konsep *supply-leading* dan *demand-following*. Dalam konsep *supply-leading*, sektor keuangan digambarkan sebagai penggerak pertumbuhan melalui penyediaan dan pengalokasian sumber daya ke sektor produktif. Sedangkan konsep *demand-following* mengacu pada teori dimana pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan sektor jasa keuangan.

Hubungan sebab akibat antara perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi tampak bergantian dengan perkembangan ekonomi. Menurut Patrick (1966), hipotesis *supply-leading* terjadi dalam perekonomian pada saat perkembangan, dan ketika ekonomi tumbuh, konsep ini memudar dan selanjutnya berlaku pada konsep *demand-following*.

Dalam kasus Indonesia, studi Mansur dan Nizar (2019) menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan Indonesia lebih mengikuti permintaan, atau ekonomi tumbuh terlebih dahulu kemudian sektor keuangan berkembang. Dalam kajian tersebut, indikator yang digunakan sebagai proksi besaran perkembangan sektor keuangan Indonesia antara lain rasio kredit sektor swasta terhadap PDB, rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB, rasio nilai SBN beredar yang dapat diperdagangkan

terhadap PDB, rasio total *outstanding* obligasi korporasi terhadap PDB, dan rasio aset reksa dana terhadap PDB. Dengan menggunakan model *Structural Vector Autoregressive bivariate*, studi menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu peningkatan kebutuhan pembiayaan atau kredit.

Sementara itu, Wasiaturrahma et. Al. (2020) menyimpulkan baik BPR maupun BPRS masih belum efisien dalam peran intermediasi namun efisien dalam produksi. Hasil efisiensi dipengaruhi secara positif oleh lokasi dan rasio kecukupan modal (CAR). BPR yang beroperasi di perkotaan cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan sebaliknya. Selain itu, semakin tinggi modal, BPR dan BPRS semakin efisien dalam hal produksi dan intermediasi.

1.5 Metodologi

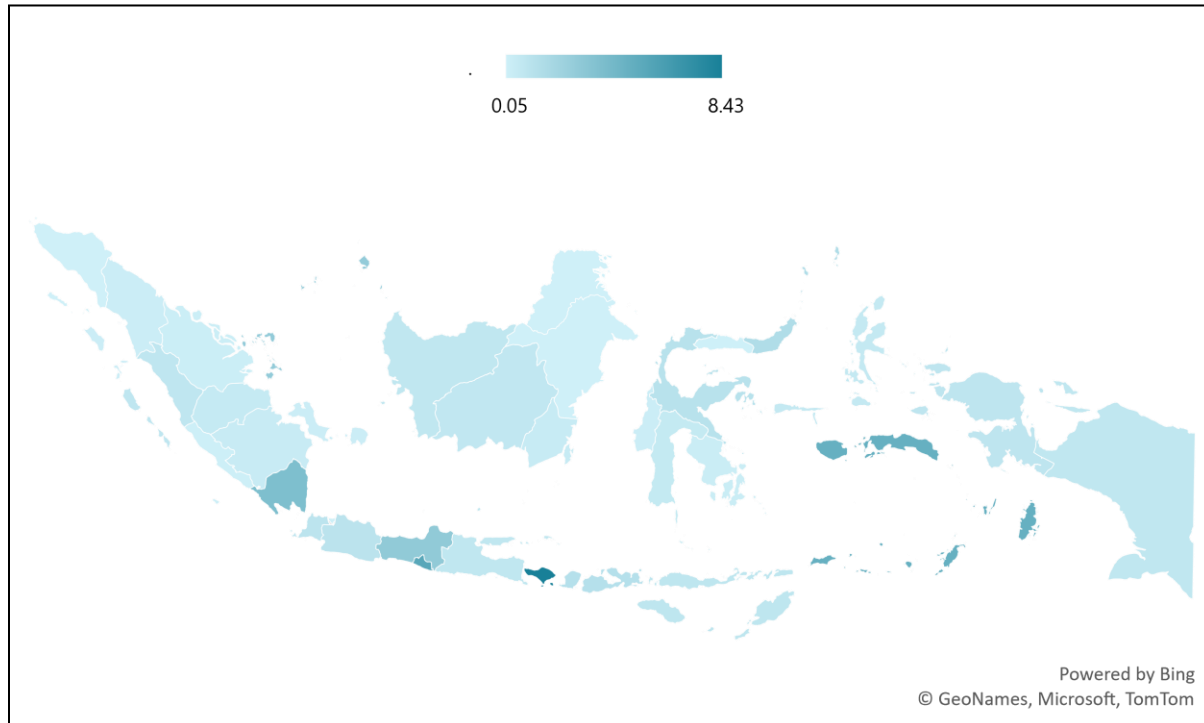
Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif dan deskriptif berdasarkan hasil pengolahan data sekunder. Data diolah menggunakan perhitungan matematika sederhana seperti rasio, persentase, dan *plotting* dengan bantuan aplikasi Ms. Excel.

DIAGNOSA BPR/BPRS: TINJAUAN PORTOFOLIO DAN KINERJA BPR/BPRS NASIONAL

Pada bagian ini akan ditelaah portofolio dan kinerja BPR/BPRS per regional dengan mengacu kepada beberapa aspek portofolio dan kinerja, yaitu aset, pembiayaan dan dana.

2.1 Aset BPR/BPRS terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Gambar h. Kontribusi Aset BPR/BPRS terhadap PDB Regional



Sumber: Bank Indonesia dan BPS, Des 2021

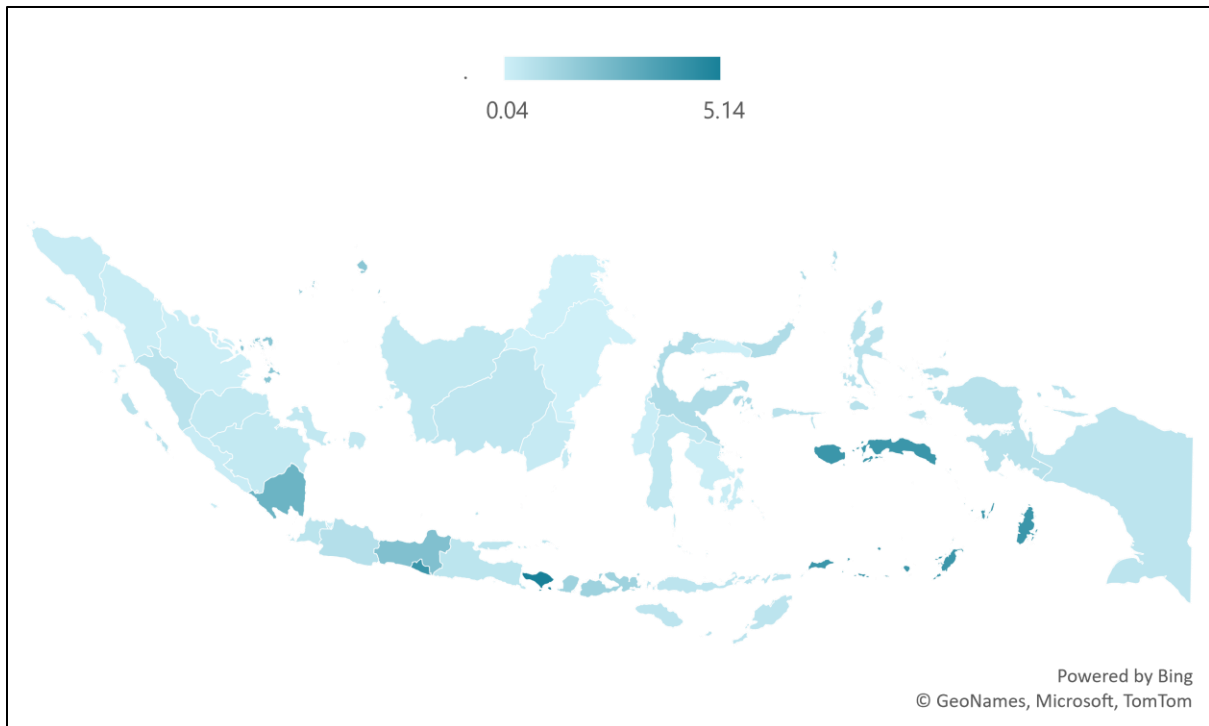
Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung

Secara keseluruhan, aset dari BPRS/S hanya mewakili 0,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (tahun 2021). Secara regional, Provinsi Bali menempati posisi teratas sebagai provinsi di mana BPR/BPRS memiliki kontribusi relatif substansial terhadap PDB regional Bali dengan kontribusi sebesar 8,34 persen. Sementara, DI Yogyakarta, Maluku, Lampung dan Jawa Tengah menyusul di posisi seterusnya (sesuai dengan urutan penulisan) dengan kontribusi aset terhadap PDB regional masing-masing sebesar 5,52 persen, 4,84 persen, 3,74 persen dan 2,89 persen. Adapun provinsi dengan kontribusi BPRS/S terendah terhadap PDB-nya secara berurutan adalah Aceh (0,05 persen), Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (0,06 persen), Gorontalo (0,07 persen), DKI Jakarta (0,14 persen) dan Bengkulu (0,15 persen).

2.2 Pembiayaan BPR/BPRS terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Dalam kerangka rasio pembiayaan BPR/BPRS terhadap PDB nasional, total pembiayaan BPR/BPRS terhadap PDB nasional (tahun 2021) relatif kecil sebesar 0,73 persen.

Gambar i. Kontribusi Aset BPR/BPRS terhadap PDB Regional per Provinsi



Sumber: Bank Indonesia dan BPS, Des 2021

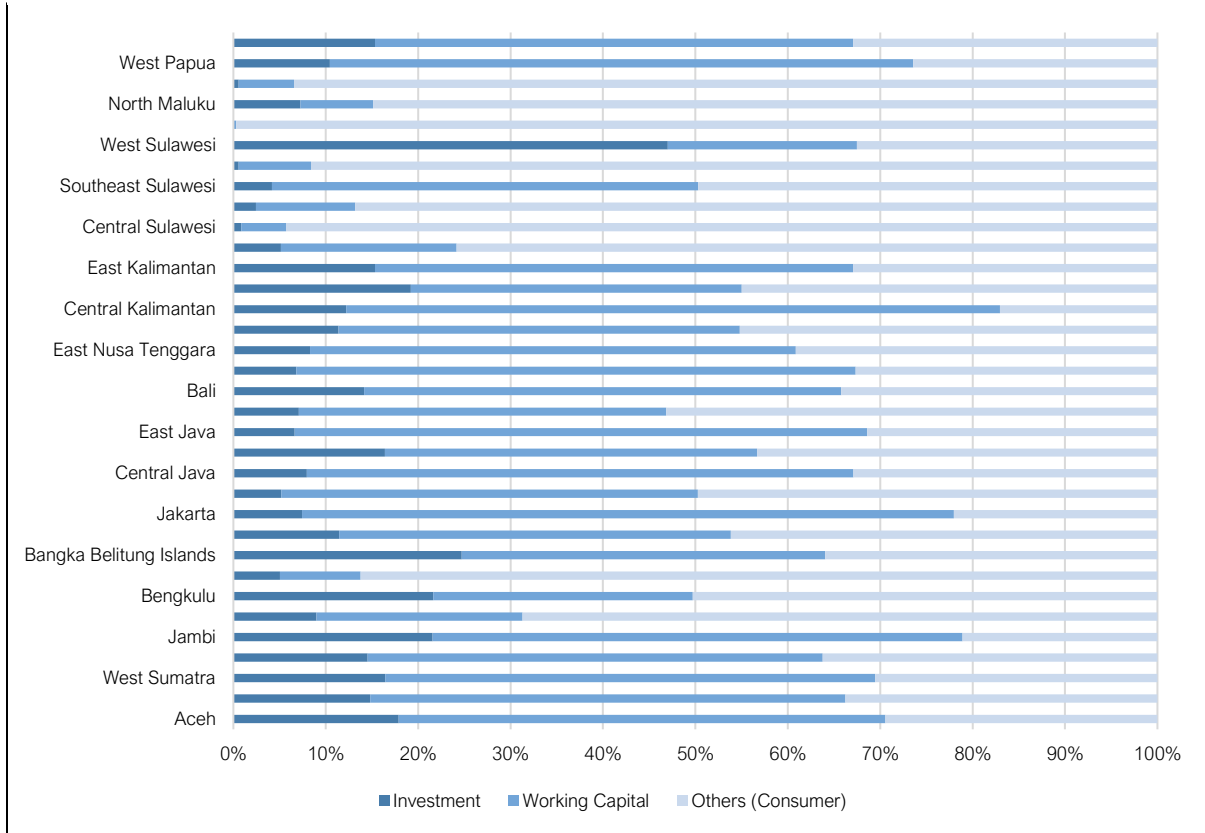
Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung

Berdasarkan analisa secara regional (provinsi), sejalan dengan provinsi dengan rasio kontribusi aset BPR/BPRS terhadap PDB regional, maka provinsi Bali, DI Yogyakarta, Maluku, Lampung dan Jawa Tengah secara berurutan (dari yang terbesar), merupakan provinsi dengan rasio pembiayaan terhadap PDB regional yang menempati posisi lima besar. Adapun rasio pembiayaan BPR/BPRS terhadap PDB regional di Bali sebesar 5,14 persen, Di Yogyakarta dan Maluku sebesar 4,16 persen, Lampung sebesar 2,79 persen dan Jawa Tengah sebesar 2,21 persen. Sementara lima provinsi dengan rasio pembiayaan terhadap PDB regional terendah adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (digabung) dengan rasio sebesar 0,04 persen, Gorontalo dan Riau dengan rasio sebesar 0,13 persen, Jakarta dengan sebesar 0,15 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 0,17 persen.

Lebih lanjut, dalam konteks pembiayaan, selain sebaran pembiayaan, juga ditinjau terkait dengan portofolio pembiayaan dan perbandingan kinerja pembiayaan menggunakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) BPR/BPRS per-regional.

2.2.1 Sebaran Portofolio Pembiayaan BPR/BPRS Regional

Gambar j. Portofolio Pembiayaan BPR/BPRS per Provinsi



Sumber: Bank Indonesia dan BPS, Des 2021

Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung

Dalam kerangka kinerja portofolio pembiayaan BPR/BPRS, dibagi menjadi tiga kategori yaitu investasi, modal kerja dan lainnya (konsumsi). Portofolio pembiayaan BPR/BPRS terbesar ditujukan untuk pembiayaan modal kerja sebanyak 45,9 persen, lainnya (konsumsi) sebesar 45,7 persen dan investasi sebesar 8,4 persen.

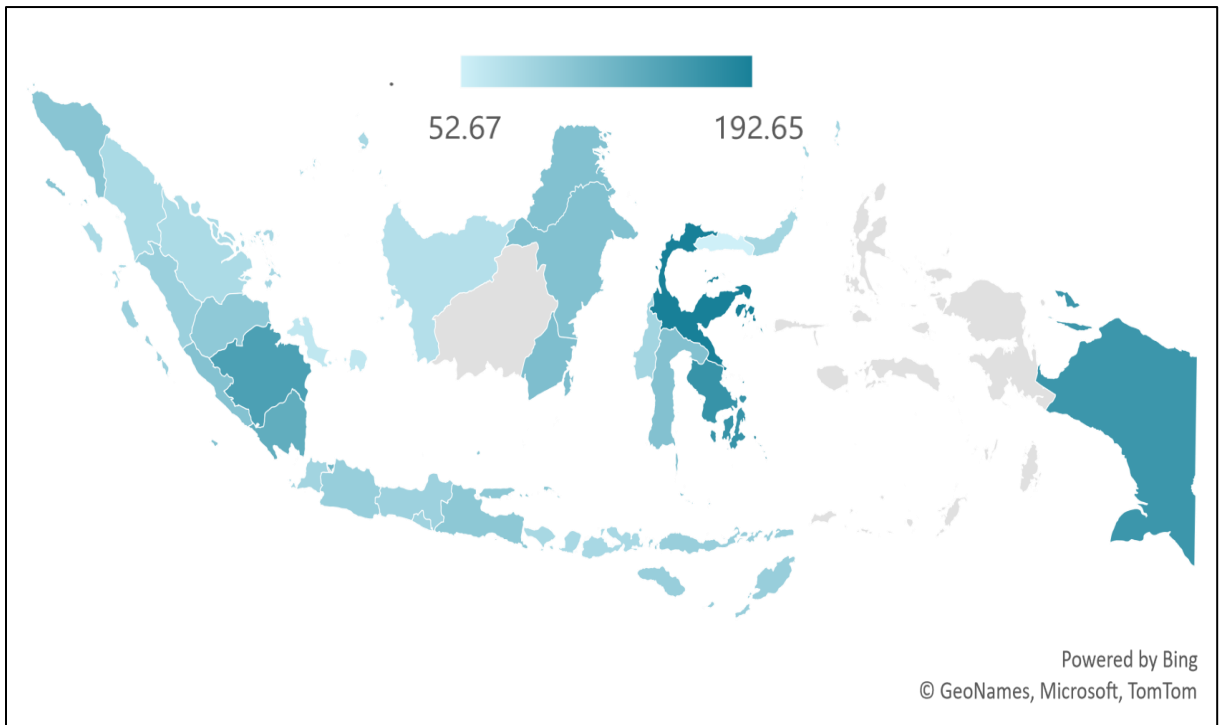
Adapun provinsi dengan portofolio pembiayaan investasi dari BPR/BPRS adalah Sulawesi Barat sebesar 47 persen dari total pembiayaan, disusul oleh Bangka Belitung sebanyak 24,7 persen, dan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar 21,6 persen. Sementara provinsi dengan portofolio pembiayaan investasi BPR/BPRS terendah adalah Maluku (0,02 persen), Provinsi Papua dan Provinsi Gorontalo (masing-masing 0,6 persen), dan Sulawesi Tengah (0,8 persen).

Untuk portofolio pembiayaan modal kerja BPR/BPRS, provinsi yang menempati posisi teratas dalam sebaran portofolio pembiayaan modal kerja BPR/BPRS tertinggi adalah Kalimantan Tengah (70,7 persen), DKI Jakarta (70,5 persen) dan Papua Barat (63,1 persen). Adapun provinsi dengan sebaran portofolio pembiayaan modal kerja BPR/BPRS terendah adalah Maluku (0,3 persen), Sulawesi Tengah (4,9 persen) dan Papua Barat (6,0 persen).

2.2.2 Sebaran *Loan to Deposit Ratio* BPR/BPRS Regional

Secara nasional, nilai (rasio) likuiditas (*Loan to Deposit Ratio* atau LDR (*Financing to Deposit Ratio* atau FDR pada BPRS)) yang dianggap wajar relatif berada pada di nilai rasio sekitar 92 persen. Merujuk kepada nilai tersebut, rasio likuiditas pada BPR/BPRS nasional dapat dikatakan berlebih pada angka 99,89 persen.

Gambar k. Tingkat LDR (FDR) BPR/BPRS Regional



Sumber: Bank Indonesia, Des 2021

Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung;

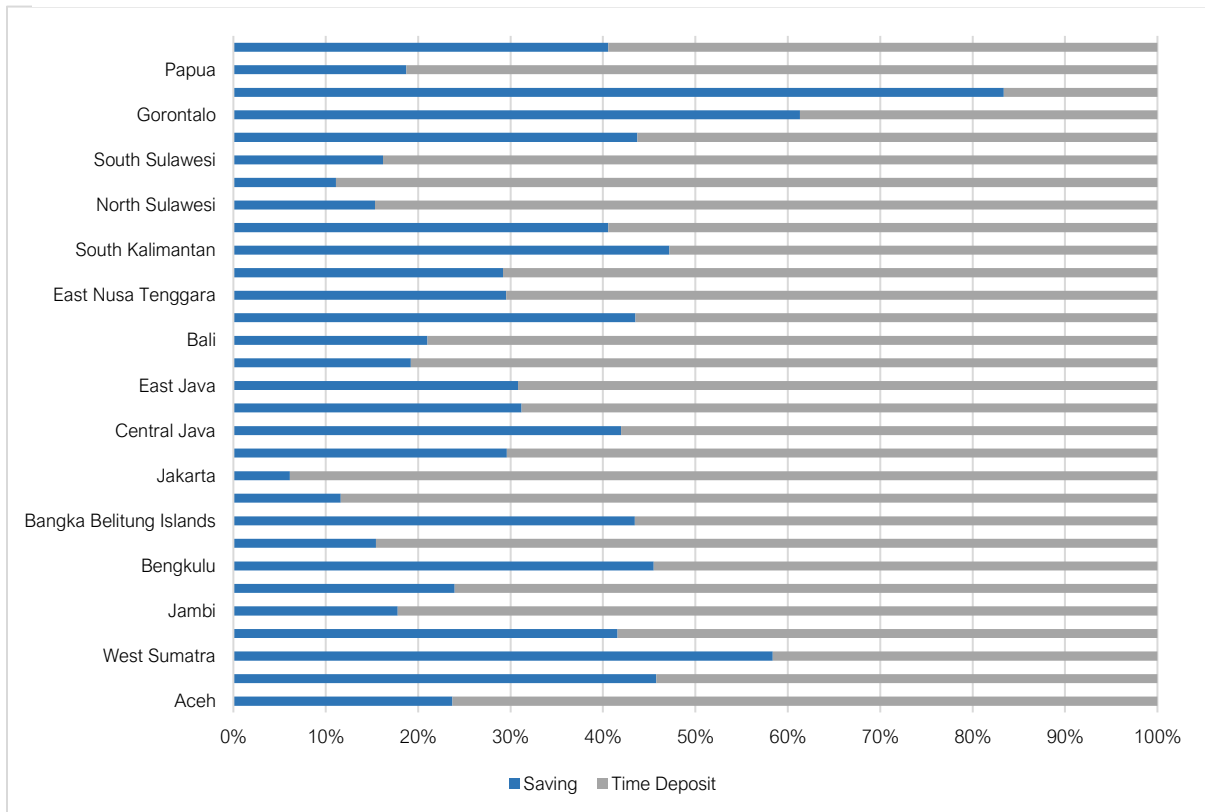
Data deposito BPR tidak tersedia untuk Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, and Papua Barat

Berdasarkan data yang ada, merujuk kepada nilai LDR nasional sebelumnya, provinsi dengan nilai LDR BPR/BPRS yang relatif ideal (92 persen), yang mencerminkan fungsi intermediari yang efektif, adalah Sumatra Barat (92,5 persen), Jawa Tengah (90,9 persen) dan Nusa Tenggara Timur (94,8 persen). Sementara, terdapat dua kondisi yang sangat timpang yaitu provinsi dengan nilai LDR BPR/BPRS yang sangat tinggi dan sangat rendah. Provinsi dengan nilai LDR BPR/BPRS yang sangat tinggi (kondisi likuiditas yang sangat berlebih) adalah Sulawesi Tengah (192,6 persen), Sulawesi Tenggara (168,9 persen), dan Papua (164,9 persen). Sementara provinsi dengan nilai LDR BPR/BPRS yang terendah (fungsi intermediari yang tidak efektif) adalah Gorontalo (52,67 persen), Bangka Belitung (63,8 persen) dan Kalimantan Barat (73,7 persen).

2.3 Portofolio Dana BPR/BPRS Regional

Portofolio BPR/BPRS regional dibagi menjadi dua jenis yaitu tabungan dan deposito. Secara nasional, komposisi portofolio dana BPR/BPRS nasional yaitu tabungan sebanyak 30 persen dan deposito sebanyak 70 persen.

Gambar 1. Portofolio Dana BPR/BPRS per Regional



Sumber: Bank Indonesia, Des 2021

Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung;

Data deposito BPR tidak tersedia untuk Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, and Papua Barat

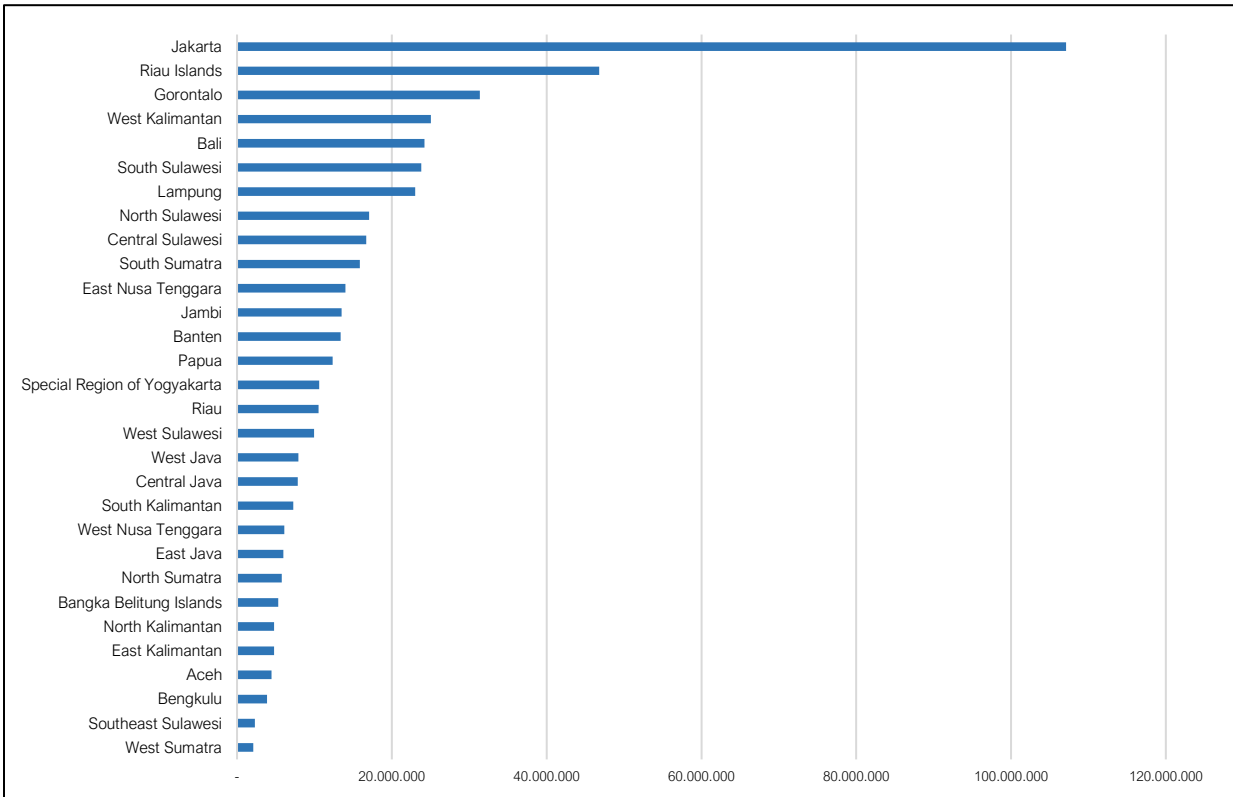
Merujuk kepada data yang ada, region atau provinsi dengan rasio dana tabungan terhadap total dana BPR/BPRS tertinggi adalah Sulawesi Barat (83,4 persen), Gorontalo (61,3 persen) dan Sumatera Barat (58,4 persen). Adapun provinsi dengan rasio dana tabungan terhadap total dana BPR/BPRS terendah adalah DKI Jakarta (6,1 persen), Sulawesi Tengah (11,1 persen) dan Kepulauan Riau (11,6 persen).

Sementara untuk provinsi dengan tingkat rasio dana deposito terhadap total dana BPR/BPRS tertinggi adalah DKI Jakarta (93,9 persen), Sulawesi Tengah (88,9 persen) dan Kepulauan Riau (88,4 persen). Selanjutnya, untuk provinsi dengan tingkat rasio dana deposito terhadap total dana BPR/BPRS terendah adalah Sulawesi Barat (16,6 persen), Gorontalo (38,7 persen) dan Sumatera Barat (41,6 persen).

2.4 Sebaran dan Besaran Rata-Rata Deposito BPR/BPRS Regional

Berdasarkan data yang tersedia, didapatkan bahwa besaran rata-rata nilai tabungan BPR/BPRS secara nasional sebesar Rp2.800.208. Sementara, untuk besaran rata-rata nilai deposito BPR/BPRS nasional adalah Rp131.227.851.

Gambar m. Rata-Rata Dana Tabungan BPR/BPRS per Regional



Sumber: Bank Indonesia, Des 2021

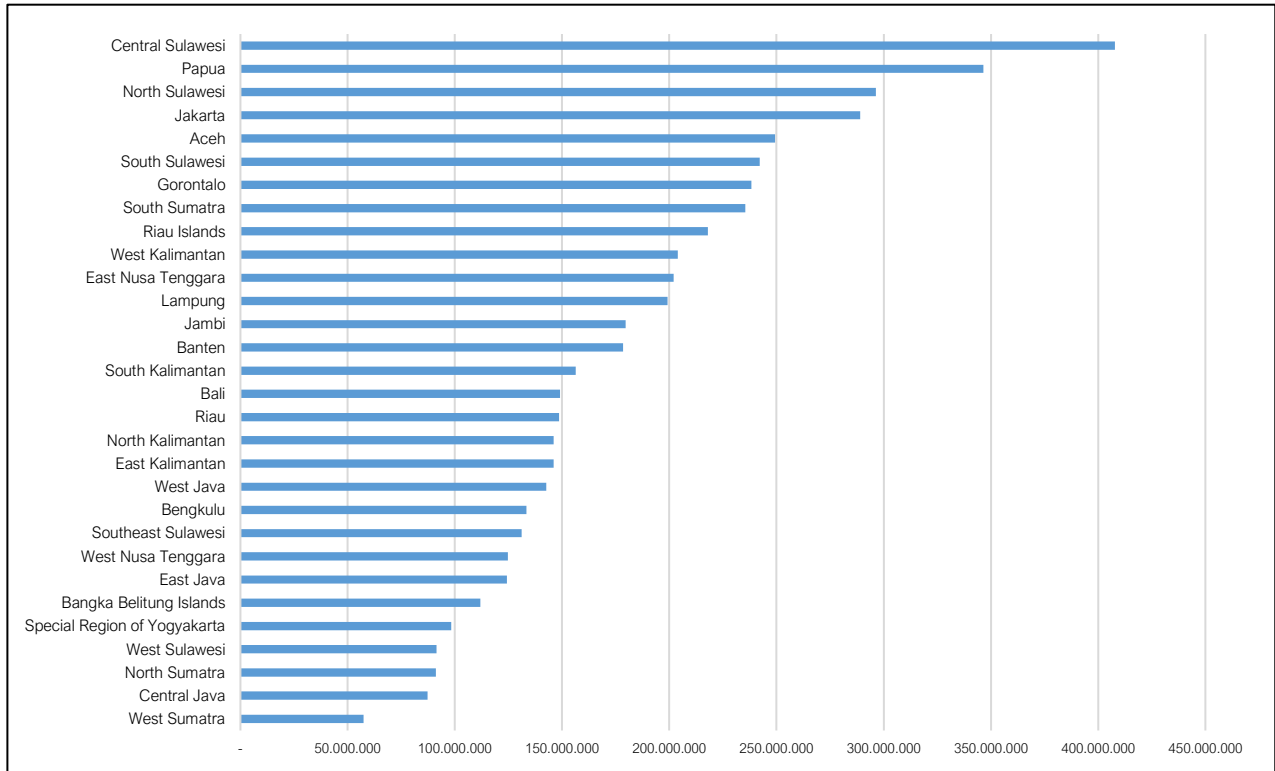
Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung;

Data deposito BPR tidak tersedia untuk Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, and Papua Barat;

Besaran rata-rata adalah total tabungan dan deposito dibagi dengan jumlah total rekening

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan besaran rata-rata tabungan BPR/BPRS provinsi terbesar di atas Rp100 juta dan posisi kedua adalah Kepulauan Riau dengan besaran rata-rata mendekati Rp50 juta. Sementara, Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan besaran rata-rata nilai deposito BPR/BPRS terbesar, yaitu lebih dari Rp400 juta dan Papua dengan besaran rata-rata deposito BPR/BPRS di kisaran Rp350 juta.

Gambar n. Rata-Rata Dana Deposito BPR/BPRS per Regional



Sumber: Bank Indonesia, Des 2021

Catatan: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabung;

Data deposito BPR tidak tersedia untuk Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, and Papua Barat;
Besaran rata-rata adalah total tabungan dan deposito dibagi dengan jumlah total rekening

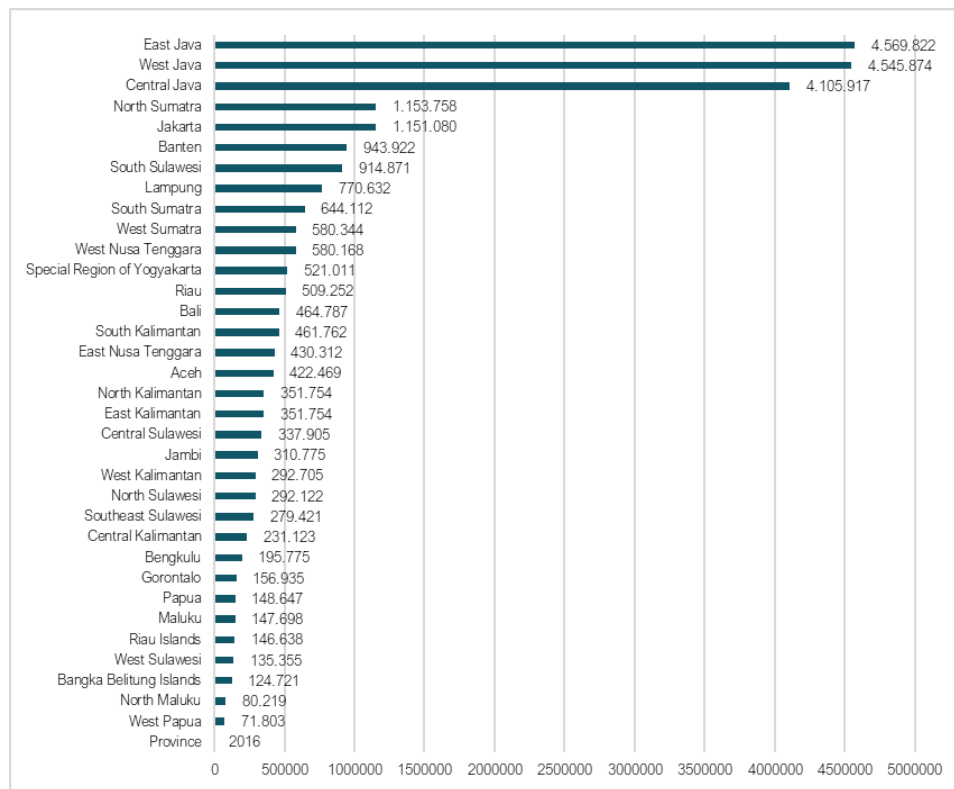
DIAGNOSA UMK: TINJAUAN SEBARAN KARAKTERISTIK UMK NASIONAL

3.1 Sebaran Karakteristik UMK Nasional: Jumlah UMK terhadap PDRB dan Pekerja

Usaha Mikro dan Kecil merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMK, UMK Indonesia mewakili 99,9 persen dari populasi bisnis dan memberikan kontribusi 61 persen (Rp8.573,9 triliun) dari PDB Nasional serta menyerap 97 persen dari total tenaga kerja pada tahun 2021. Di setiap masa krisis, UMK juga telah menjadi penyangga perekonomian, tangguh bertahan, dan bisa pulih dengan baik.

Secara lebih detail, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan survei ekonomi tahun 2016 yang mengidentifikasi UMK di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 26,4 juta UMK di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi. Sebagian besar UMK berada di pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Gambar o. Jumlah Usaha Kecil dan Mikro

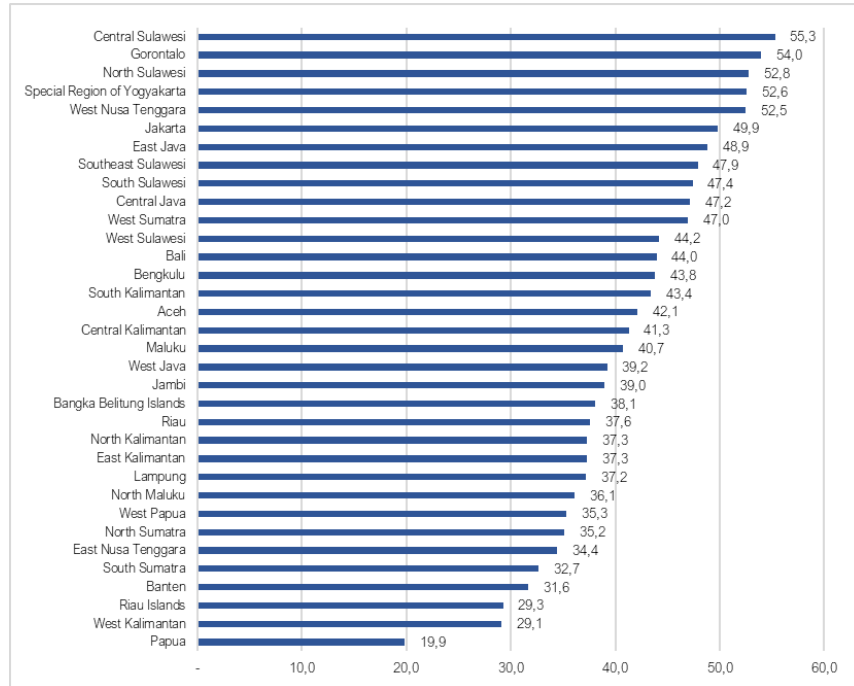


Sumber: Survei Ekonomi BPS, 2016

Lebih lanjut, UMK juga menyumbang lebih 48 persen pekerja dari total angkatan kerja nasional. Beberapa provinsi di Sulawesi sangat mengandalkan UMK dalam penyediaan lapangan kerja karena porsi UMK mencapai lebih dari 50 persen, seperti Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Kondisi ini

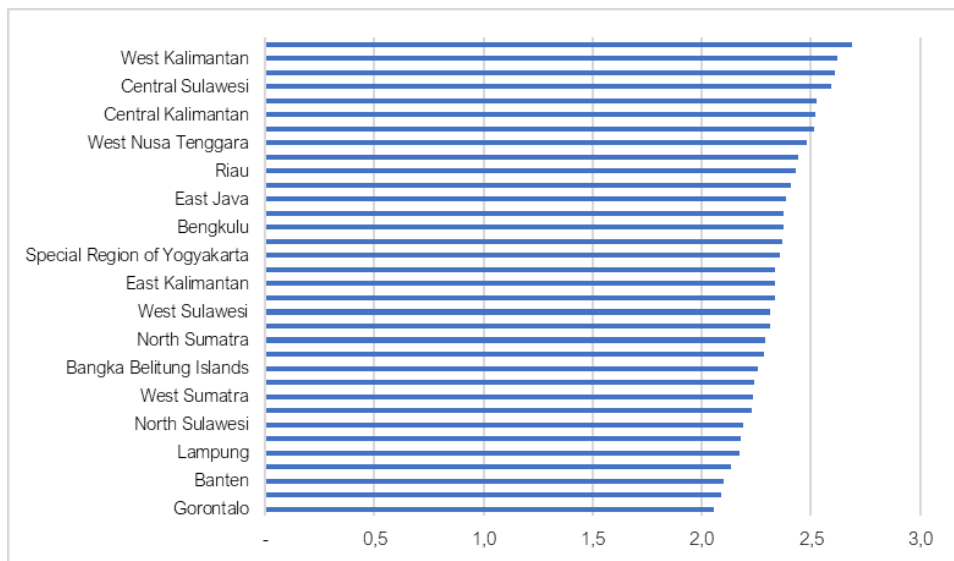
menggambarkan pentingnya peran UMK untuk perekonomian secara nasional maupun regional. Sementara itu, rata-rata jumlah pekerja sebanyak 2,2 pekerja per UMK secara nasional.

Gambar p. Rasio Pekerja UMK dari Total Angkatan Kerja Daerah (%)



Sumber: Survei Ekonomi BPS, 2016

Gambar q Rata-rata Jumlah Pekerja di UMK



Sumber: Survei Ekonomi BPS, 2016

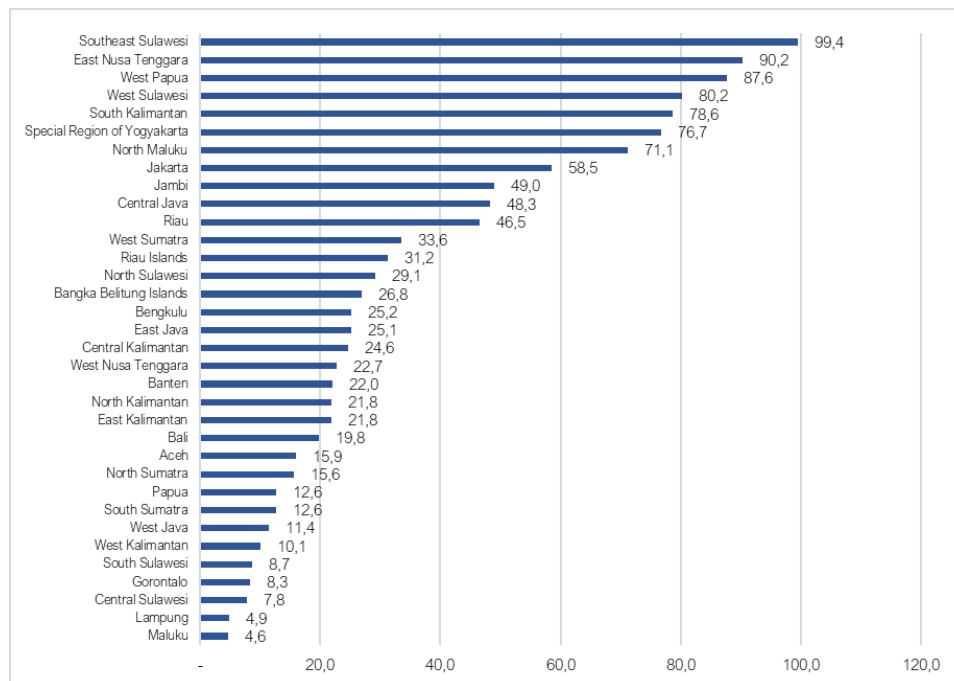
3.2. Sebaran Pembiayaan terhadap UMK

Perkembangan UMK Indonesia masih memiliki tantangan, salah satunya adalah masalah pembiayaan. UMK memerlukan sumber pembiayaan yang mudah, murah serta sesuai dengan karakternya. Untuk itu, BPR/BPRS hadir sebagai institusi keuangan mikro penyalur dana masyarakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah. BPR/BPRS dikenal melayani UMK di lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil survei BPS, hanya 30 persen UMK yang mendapatkan pembiayaan dari bank ketika didirikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses pembiayaan terhadap UMK perlu terus didorong guna mendukung pengembangannya.

Secara spasial, 5 (lima) provinsi yang memiliki presentase terbesar UMK yang mendapatkan pembiayaan bank pada saat didirikan adalah Sulawesi Selatan (99,4 persen), Nusa Tenggara Timur (90,2 persen), Papua Barat (80,2 persen), Sulawesi Barat (78,6 persen) dan Kalimantan Selatan (76,7 persen). Sementara itu, 5 provinsi dengan presentasi UMK terendah yang mendapat pembiayaan bank pada saat didirikan adalah Maluku (4,6 persen), Lampung (4,9 persen), Sulawesi Tengah (7,8 persen), Gorontalo (8,3 persen) dan Sulawesi Selatan (8,7 persen).

Gambar r. Persentase UMK yang Mendapat Pembiayaan Bank pada Saat Didirikan

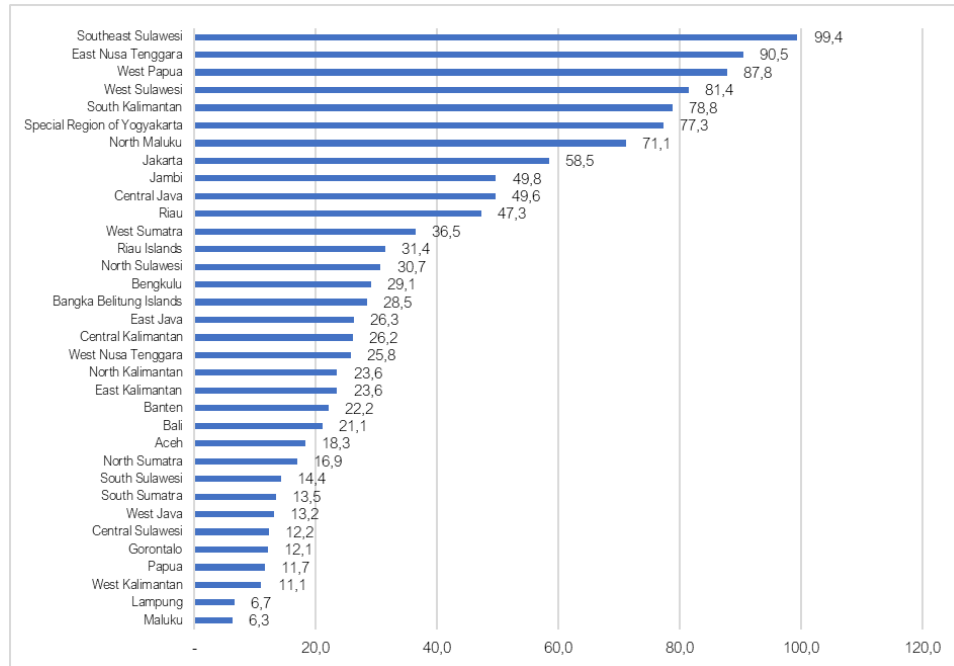


Sumber: Survei Ekonomi BPS, 2016

Sementara itu, presentasi UMK yang mendapatkan pembiayaan dari bank pada saat survei tergolong masih rendah yakni sebesar 31,6 persen UMK. Secara spasial, 5 provinsi yang memiliki presentase terbesar UMK yang mendapatkan pembiayaan bank pada saat survei adalah Sulawesi Tenggara (99,4 persen), Nusa Tenggara Timur (90,5 persen), Papua Barat (87,8 persen), Sulawesi Barat (81,5 persen) dan Kalimantan

Selatan (77,3 persen). Sementara itu, 5 provinsi dengan presentasi UMK terendah yang mendapat pembiayaan bank pada saat didirikan adalah Maluku (6,3 persen), Lampung (6,7 persen), Kalimantan Barat (11,1 persen), Papua (11,7 persen) dan Gorontalo (12,1 persen).

Gambar s. Persentase UMK yang Mendapat Pembiayaan Bank pada Saat Survei



Sumber: Survei Ekonomi BPS, 2016

Untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi pembiayaan UMK dari lembaga keuangan (Bank dan BPR/BPRS) dilakukan pemetaan kondisi pembiayaan UMK dan peran BPR dalam perekonomian daerah. Dalam hal ini, dilakukan *plotting* seluruh provinsi dalam 4 (empat) kuadran atas persentase UMK yang mendapatkan pembiayaan dari bank dengan persentase aset BPR dalam perekonomian daerah. Empat kuadran tersebut terdiri dari:

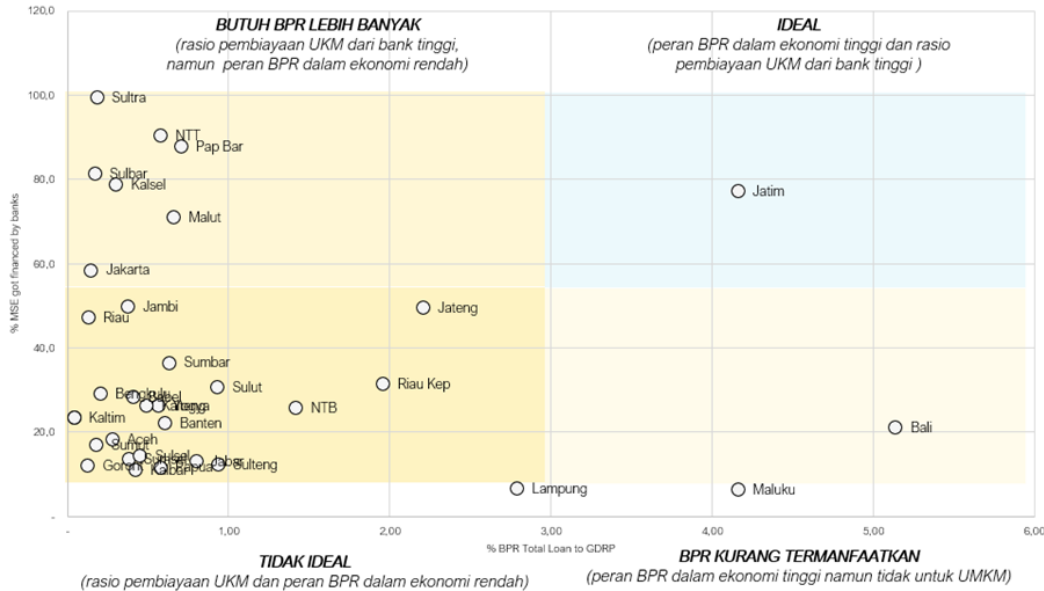
1. Kuadran I: Provinsi dengan rasio pembiayaan UMK dari bank tinggi, namun peran BPR dalam ekonomi rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa provinsi di dalam kuadran I butuh BPR lebih banyak.
2. Kuadran II: Provinsi dengan kontribusi BPR dalam ekonomi yang tinggi dan rasio pembiayaan UMK dari bank juga tinggi. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang ideal.
3. Kuadran III: Provinsi dengan peran BPR dalam ekonomi yang tinggi namun rasio pembiayaan UMK dari bank rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPR yang tinggi dalam ekonomi bukan untuk UMK atau BPR kurang termanfaatkan (*under-utilized*).
4. Kuadran IV: Provinsi dengan rasio pembiayaan UMK dari bank rendah dan peran BPR dalam ekonomi juga rendah. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang tidak ideal.

Dari hasil analisa kuadran tersebut dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Sebagian besar provinsi wilayah (24 provinsi) di Indonesia berada di kondisi tidak ideal (kuadran IV) dengan rasio pembiayaan UMK dari bank rendah dan peran BPR dalam ekonomi juga rendah.

2. Terdapat 7 (tujuh) provinsi yang memerlukan BPR lebih banyak (kuadran I) yakni Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat, NTT.
3. Hanya terdapat satu provinsi yang berada dalam kondisi ideal (kuadran II), yakni Jawa Timur.
4. Terdapat 2 (dua) provinsi dengan peran BPR dalam ekonomi yang tinggi namun rasio pembiayaan UMK dari bank rendah, yakni Bali dan Maluku. Kedua provinsi ini belum memanfaatkan BPR untuk UMK secara optimal meskipun peran BPR terhadap ekonomi relatif besar.

Gambar t. Identifikasi Kondisi Pembiayaan UMK melalui BPR dengan metode kuadran



Sumber: Survei Ekonomi BPS, 2016, diolah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. BPR/BPRS berpotensi untuk berkembang bersama UMK, Namun, saat ini kontribusi BPR/BPRS perlu terus didorong mengingat aset dari BPR/BPRS hanya mewakili 0,95 persen dari PDB nasional (tahun 2021).
2. Berdasarkan pemetaan data provinsi, BPR/BPRS memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebaran pembiayaan dan sumber dana sangat beragam. Untuk itu, kebijakan pengembangan BPR/BPRS tidak bisa diseragamkan (*one fit for all*) dan harus mempertimbangkan karakteristik yang ada.
3. Perlu penelitian lebih lanjut dengan berlandaskan hasil penelitian data sekunder. Ke depan, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan melalui survei *online/offline, in-depth interview* dengan beberapa BPR/BPRS, dan *focus group discussion*.

